

WORKSHOP PENINGKATAN LITERASI INVESTASI BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan BERKELANJUTAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

Sirwan Yazid Bustami*, Alfian Hidayat,
Kurnia Zulhandayani Rizki, Mega Nisfa Makhroja

*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum,
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia*

Alamat korespondensi: irwan@unram.ac.id

ABSTRAK

Aliran investasi yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) dituding melanggar prinsip-prinsip investasi berkelanjutan (*sustainable investment*). Indikasi ini muncul seiring dengan pelbagai persoalan investasi yang terjadi menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena mengejar keuntungan serta mengabaikan pemenuhan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sehingga keberadaan investasi tidak menyokong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika. Beragam persoalan investasi di KEK Mandalika mengindikasikan rendahnya tingkat literasi warga masyarakat sekitar menyangkut investasi berkelanjutan. Terlebih lagi eksklusivitas pembangunan KEK Mandalika di bawah otoritas *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) menempatkan mereka sebagai objek pembangunan tanpa terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di KEK Mandalika, diperlukan peningkatan literasi investasi berkelanjutan sehingga mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan KEK Mandalika. Oleh karena itu, kegiatan *workshop* diselenggarakan untuk meningkatkan literasi warga masyarakat sekitar mengenai konsepsi investasi berkelanjutan yang berorientasi pada pertumbuhan hijau (*green growth*) demi mendukung peningkatan indeks SDGs di Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), didiseminasikan konsepsi, urgensi, dan permasalahan investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs di KEK Mandalika. Secara implisit, kegiatan *workshop* mendorong peningkatan literasi investasi berkelanjutan serta memunculkan optimisme partisipasi aktif warga masyarakat sekitar dalam berkontribusi mendukung peningkatan indeks SDGs di Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat setelah memahami secara komprehensif konsepsi, urgensi, dan permasalahan investasi berkelanjutan di KEK Mandalika.

Kata Kunci: KEK Mandalika, Literasi, Investasi Berkelanjutan, SDGs

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK, *special economic zone*) merupakan salah satu kebijakan strategis yang dirumuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional di sebagian besar negara-negara di dunia. Kontribusi KEK yang begitu besar dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi perdagangan serta kontribusinya dalam meningkatkan investasi asing langsung (FDI, *foreign direct investment*) serta mendorong pembukaan lapangan kerja baru menempatkan KEK sebagai kebijakan primadona hingga diadopsi di lebih dari 130 negara di seluruh dunia (Cheesman, 2012). Keberadaan KEK seringkali diposisikan sebagai mesin pertumbuhan sektor industri karena dianggap mampu mempromosikan kegiatan ekspor, menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas penanaman modal asing (FDI) maupun domestik, mendorong pencapaian tujuan pembangunan regional serta meningkatkan pendapatan negara atas pajak.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), pada tahun 2015, terdapat sekitar 4.500 KEK di 140 negara yang

mempekerjakan hampir 66 juta penduduk dunia. Khusus di kawasan ASEAN terdapat 84 KEK yang beroperasi di 10 negara. Masing-masing KEK tersebut menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik investasi dan bahkan terjadi persaingan insentif antarnegara (Yoga, 2016). Persaingan ini menunjukkan peranan penting KEK dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah (DDTC, 2021). Melalui perlakuan khusus ini, KEK didorong untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi dengan berbagai macam kemudahan aturan bisnis yang ditawarkan agar mampu berkompetisi dalam menarik investasi baik asing maupun domestik.

Pengembangan KEK di Indonesia didorong oleh keberhasilan beberapa negara di dunia terutama Tiongkok. Indonesia mulai menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi regional berbasis KEK sekitar tahun 1970-an dengan menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai *pilot project* bagi pengembangan KEK berbasis industri. Keberhasilan ketiga KEK industri tersebut dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan lebih banyak KEK di beberapa wilayah lain. Inisiatif pengembangan KEK pada mulanya mengemuka di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun mulai digarap secara serius di era pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui sejumlah *master plan* pengembangan KEK berbasis pariwisata dan industri (Shanti et al., 2018).

Salah satu KEK berbasis pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia adalah KEK Mandalika. Terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan secara geografis berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2014, KEK Mandalika secara resmi beroperasi sebagai KEK berbasis pariwisata. Pembentukan KEK Mandalika diinspirasi oleh kisah sukses pariwisata Bali sebagai tujuan pariwisata kelas dunia. KEK Mandalika berada di bawah otoritas pengelolaan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) Persero atau *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pengembangan kawasan pariwisata (Ashari, 2022). Pembangunan KEK Mandalika diproyeksikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional di sektor pariwisata di NTB (Lina, 2018).

Salah satu misi utama KEK Mandalika adalah menarik investasi sebesar-besarnya guna membangun infrastruktur dasar, pendukung dan sarana dan prasarana lain agar mampu beroperasi. Investasi sangat diperlukan dalam pengembangan KEK Mandalika karena keterbatasan pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sehingga pihak ITDC selaku otoritas pengelola KEK Mandalika berupaya menarik investasi baik asing maupun domestik ke berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri (Widyaningrum, 2023). Salah satu investor besar yang menanamkan modalnya di KEK Mandalika adalah AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*). Total pembiayaan investasi yang dikucurkan AIIB senilai Rp3,8 triliun. Pembiayaan ini merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dibandingkan dengan sumber pendanaan lain yang dikucurkan untuk ITDC (Gumelar, 2018).

Masuknya investasi AIIB dalam bentuk utang luar negeri (ULN) menimbulkan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan serius yang disoroti adalah permasalahan investasi berkelanjutan di KEK Mandalika. Investasi AIIB dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) karena dituding banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena mengabaikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. AIIB dinilai hanya fokus pada keuntungan bisnis semata tanpa menghiraukan pentingnya pembangunan lingkungan dan sosial di sekitar KEK Mandalika.

Salah satu pihak yang mengkritik keras investasi AIIB di KEK Mandalika adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB melalui Dewan HAM PBB (UNHRC, *United Nations Human Rights Council*) mengancam investasi pembangunan AIIB karena menciptakan berbagai macam permasalahan setelah melakukan investigasi lapangan di KEK Mandalika. UNHCR menyimpulkan AIIB tidak mematuhi standar HAM sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional serta prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM sehingga menciptakan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh pengusuran lahan, pengusiran paksa, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan pembebasan lahan masyarakat, termasuk masyarakat adat melalui paksaan, intimidasi, dan manipulasi karena melanggar prinsip persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Masyarakat terpaksa menjadi

tunawisma sebagai akibat dari pemukiman kembali secara paksa, sementara lebih dari 100 keluarga terpaksa tinggal di samping lokasi konstruksi di dekat lintasan balap MotoGP.

Investasi asing yang masuk ke KEK Mandalika juga dinilai tidak memenuhi ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Indikasi ini menguat karena berbagai macam pelanggaran yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh Koalisi Pemantau Infrastruktur Indonesia (KPII) bersama-sama dengan UNHRC (WALHI, 2022). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mewajibkan penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL (Rahman, 2022). Namun pada kenyataannya, berbagai macam persoalan muncul seiring dengan masuknya investasi asing di KEK Mandalika. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat literasi masyarakat di sekitar KEK Mandalika mengenai konsepsi investasi berkelanjutan.

Pembangunan KEK Mandalika berorientasi pada model pembangunan pariwisata ekologis (*ecotourism*). Konsep semacam ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam mendukung tercapainya pembangunan kawasan pariwisata ekologis. Konsep investasi berkelanjutan juga selaras dengan misi pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah NTB sebagaimana tertuang dalam rencana aksi daerah percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran investasi berkelanjutan di KEK Mandalika diharapkan berkontribusi besar bagi upaya pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan indeks pembangunan berkelanjutan pemerintah Provinsi NTB (Taufan, 2019).

METODE KEGIATAN

Berdasarkan pemaparan analisis situasi terkait dengan persoalan rendahnya tingkat literasi para pemangku kepentingan mengenai investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yakni *pertama*, masih rendahnya tingkat literasi mengenai investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika bagi para pelaku industri pariwisata. *Kedua*, masih rendahnya pemahaman mengenai permasalahan investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika bagi para pelaku industri pariwisata.

Selain itu, melalui penyelenggaraan kegiatan *workshop* ini diharapkan mampu mencapai berbagai macam tujuan yang ditetapkan, yakni *pertama*, meningkatkan literasi mengenai investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika bagi para pelaku industri pariwisata demi mendukung peningkatan indeks pembangunan berkelanjutan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Kedua*, peningkatan pemahaman mengenai konsep pembangunan hijau (*green development*) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika bagi para pelaku industri pariwisata.

Lebih jauh, melalui penyelenggaraan kegiatan *workshop* ini, diharapkan mampu mendatangkan manfaat sebagai berikut, yakni *pertama*, seluruh *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan) di KEK Mandalika mampu berpartisipasi secara aktif dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan hijau dan aspek pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, para pelaku industri pariwisata di KEK Mandalika mampu berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan indeks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mencermati persoalan rendahnya tingkat literasi para pemangku kepentingan mengenai investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika, maka kegiatan *workshop* ini berupaya untuk memberikan pemecahan masalah (*problem solving*) melalui berbagai macam bentuk penyampaian materi meliputi sosialisasi dan penyuluhan serta *focus group discussion* atau diskusi kelompok terpumpun (FGD). Materi yang disampaikan berupa konsepsi investasi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan; permasalahan investasi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika, serta peranan investasi berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. Beragam konsep dan

permasalahan tersebut akan didiskusikan dan selanjutnya peserta *workshop* diminta untuk membuat rumusan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap arus investasi asing sehingga mampu memenuhi standar investasi berkelanjutan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *workshop* pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Mataram (PS HI Universitas Mataram) terfokus pada upaya peningkatan literasi investasi berkelanjutan bagi warga masyarakat sekitar di Desa Kuta, Mandalika yang terdampak investasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan *workshop* dimulai dengan kegiatan korespondensi dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) seperti Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah; aparatur Kantor Desa Kuta, Mandalika selaku Desa Penyangga KEK Mandalika; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM); Kelompok Masyarakat yang Terafiliasi dengan LSM SWIM; Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Perwakilan Pelaku Industri Pariwisata di sekitar KEK Mandalika.

Korespondensi dengan para *stakeholders* dilakukan melalui format sosialisasi dan *brainstorming* mengingat kegiatan *workshop* ini berlangsung di tengah sensitivitas ketegangan antara otoritas KEK Mandalika, dalam hal ini pihak *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dengan warga masyarakat sekitar yang terdampak investasi pembangunan KEK Mandalika. Hal ini penting dilakukan dikarenakan pihak pengelola masih belum merealisasikan tanggung jawab *corporate social responsibility* (CSR) serta penyelesaian sengketa pembebasan lahan warga masyarakat sekitar yang terdampak investasi pembangunan KEK Mandalika. Selain itu, untuk memberikan keyakinan kepada seluruh *stakeholders* mengenai signifikansi dan urgensi *workshop* ini untuk tujuan peningkatan partisipasi aktif warga masyarakat sekitar melalui peningkatan literasi menyangkut konsepsi, urgensi, dan permasalahan investasi berkelanjutan di KEK Mandalika.

Kegiatan *workshop* PKM merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Kelompok Peneliti Bidang Ilmu Ekonomi Politik Internasional (ekopolin) PS HI Universitas Mataram pada bulan April–Mei 2023 bertajuk “Politik Pembebasan Lahan dan Ekspansi Industri Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Format kegiatan *workshop* PKM berlangsung dalam dua bentuk, yakni *focus group discussion* (FGD) serta penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan FGD dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi serta partisipasi aktif warga masyarakat sekitar dalam proses pembangunan KEK Mandalika melalui pemahaman menyangkut konsepsi, urgensi, dan permasalahan investasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs) di KEK Mandalika. Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai investasi berkelanjutan agar mereka tidak sekedar berperan sebagai objek pembangunan belaka, namun secara aktif berperan sebagai subjek pembangunan yang dapat turut serta memengaruhi dan menentukan jalannya proses pembangunan sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Sedangkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terfokus pada upaya sosialisasi hasil FGD serta penyuluhan materi mengenai strategi peningkatan literasi investasi berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat sekitar dalam proses pembangunan KEK Mandalika.

Kegiatan *workshop* dihadiri oleh aparatur Desa Kuta, Mandalika; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM); Kelompok Masyarakat yang Terafiliasi dengan LSM SWIM; Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Perwakilan Pelaku Industri Pariwisata di sekitar KEK Mandalika. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Desa Kuta, Mandalika dan secara keseluruhan peserta yang hadir mengikuti kegiatan berjumlah 50 orang. Materi kegiatan disampaikan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi yang diisi oleh empat narasumber, yakni Kepala Desa Kuta, Mandalika, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Kuta, Mandalika, yakni Mardan, S.H.; dosen PS HI Universitas Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Sirwan Yazid Bustami, S.IP., M.A. dan Heavy Nala Estriani, S.IP., M.Hub.Int.; dan Direktur Eksekutif LSM SWIM, Lalu Alamin. Kegiatan *workshop* diakhiri dengan sesi dialog, tanya jawab, dan rembuk desa mengenai implementasi strategi peningkatan literasi investasi berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi

warga masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan KEK Mandalika dalam mendukung pencapaian SDGs.

SOSIALISASI DAN PENYULUHAN LITERASI INVESTASI BERKELANJUTAN

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terbagi ke dalam sejumlah isu, yakni apresiasi mendalam dari aparaturnya perangkat Desa Kuta, Mandalika bagi Tim Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Ekonomi Politik Internasional (ekopolin) PS HI Universitas Mataram; dan LSM SWIM atas komitmen mendalam mendukung upaya peningkatan literasi investasi berkelanjutan dalam mencapai tujuan SDGs serta peran LSM SWIM dalam mengadvokasi peningkatan partisipasi aktif warga masyarakat sekitar yang terdampak investasi pembangunan KEK Mandalika dalam mewujudkan SDGs.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Literasi Investasi Berkelanjutan

Pertama, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh aparaturnya Kantor Desa Kuta, Mandalika. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Kepala Desa Kuta, Mandalika, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa, yakni Mardan, S.H. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas pelaksanaan kegiatan *workshop* oleh institusi pendidikan/universitas seperti Universitas Mataram guna meningkatkan sinergitas bersama dalam memajukan dan mengadvokasi kepentingan pembangunan Desa Kuta, Mandalika. *Kedua*, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Ekonomi Politik Internasional (ekopolin) PS HI Universitas Mataram. Materi pertama disampaikan oleh Heavy Nala Estriani, S.IP., M.Hub.Int. Melalui pemaparan materi bertajuk “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis *Ecotourism*: Peluang dan Tantangan”, Ibu Heavy menjelaskan konstruksi ideal investasi pembangunan KEK Mandalika melalui perspektif *ecotourism* (pariwisata ekologis). Lebih lanjut dielaborasi bahwa konsep pembangunan KEK Mandalika berbasis *ecotourism* diperlukan dalam mendukung realisasi investasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian SDGs di KEK Mandalika.

Beragam permasalahan muncul seiring dengan penetrasi investasi di KEK Mandalika. Pesatnya arus investasi yang masuk tidak diimbangi dengan perhatian terhadap isu lingkungan. Investasi di sektor pariwisata dituntut untuk memperhatikan dampak lingkungan dari pengembangan destinasi pariwisata. Investasi berkelanjutan diperlukan agar pembangunan berkelanjutan mampu direalisasikan guna menyokong keberlanjutan bisnis industri pariwisata di KEK Mandalika. Secara tegas, ia menggarisbawahi pentingnya evaluasi di sektor investasi pembangunan pariwisata di KEK Mandalika dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang timbul akibat penetrasi masif investasi asing di KEK Mandalika di tengah pesatnya pertumbuhan industri pariwisata (Estriani, 2019).

Materi sosialisasi dan penyuluhan kedua disampaikan oleh Sirwan Yazid Bustami, S.IP., M.A. bertajuk “Menakar Problematika Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”. Melalui pemaparan materi, Bapak Sirwan menjelaskan bahwa menurut Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Koalisi Indonesia untuk Monitoring Pembangunan Infrastruktur, dan ASLI Mandalika (Aliansi Solidaritas Masyarakat Lingkar Mandalika), pengelolaan KEK Mandalika menimbulkan beragam

permasalahan terutama problematika sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG, *environment, social, dan government*) antara lain, yakni masalah hak asasi manusia (HAM) dan sengketa lahan di wilayah operasi pembangunan sirkuit MotoGP meliputi tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, relokasi tanah adat, penggusuran paksa disertai intimidasi, pembayaran kompensasi yang “tidak adil”, dan persoalan pemukiman kembali (*resettlement*). Sekerumit permasalahan ini merupakan eksekusi yang timbul akibat penetrasi investasi pembangunan industri pariwisata tanpa menghiraukan prinsip-prinsip investasi yang ramah lingkungan. Sementara itu, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pengelolaan investasi di KEK Mandalika menimbulkan beragam permasalahan, terutama problematika sosial, lingkungan, dan tata kelola (ESG, *environment, social, dan government*) antara lain, yakni *pertama*, eksekusi kontestasi politik elektoral Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan Presiden; *kedua*, proses akuisisi dan kepemilikan lahan tanah; *ketiga*, tata kelola bisnis yang tidak sejalan dengan upaya kemajuan proses pembangunan KEK Mandalika (Rasyid & Darumurti, 2022).

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di KEK Mandalika diperlukan pemahaman mendalam menyangkut konsepsi investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan. Konsep investasi berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang berfokus pada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen terhadap konservasi sumber daya alam; produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT); implementasi proyek air dan udara bersih; serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar (Hachigian & McGill, 2012).

Merujuk pada *Morgan Stanley Capital International ESG Research*, konsep investasi berkelanjutan mengadopsi prinsip-prinsip ESG (*environmental, social, and governance*). ESG adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola). Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Penerapan prinsip-prinsip ESG dalam investasi diharapkan dapat menasar dua hal, yakni *financial return* dan *positively impacting*. Pendekatan investasi hijau selain digunakan sebagai sarana untuk memperoleh hasil (*financial return*) juga diharapkan mendatangkan dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan secara persisten.

Sebagai satu kesatuan yang kompleks, setiap unsur ESG secara seksama harus dapat diintegrasikan dengan baik. Unsur “E” (*environmental*) berkaitan dengan bagaimana pertimbangan perusahaan dalam memposisikan diri terhadap isu lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Sedangkan unsur “S” (*social*) berkenaan dengan pengelolaan hubungan sosial antara satu dengan lainnya. Terakhir, unsur “G” (*governance*) atau tata kelola berkaitan dengan standar dalam menjalankan perusahaan (Pérez et al., 2022; Senadheera et al., 2022). Implementasi konsep ESG dalam konteks investasi berkelanjutan di KEK Mandalika menghadapi beragam persoalan problematik, yakni tanah, lapangan pekerjaan, peluang usaha, pelatihan, pendidikan, dan adat istiadat. *Pertama*, permasalahan tanah meliputi konflik kompensasi harga ganti rugi tanah dan pemukiman kembali; *kedua*, persoalan lapangan pekerjaan meliputi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang terdampak investasi pembangunan KEK Mandalika serta peningkatan kapasitas keterampilan terkait dengan pengembangan KEK Mandalika; *ketiga*, persoalan peluang usaha seperti penyediaan akses bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk memulai, mengelola, dan meningkatkan hasil usaha; *keempat*, persoalan pelatihan terkait dengan pelatihan bahasa Inggris, tata boga, usaha hotel-restoran-kafe (horeka), dan kewirausahaan dalam menunjang pengembangan KEK Mandalika; *kelima*, persoalan pendidikan mencakup pendirian Lembaga Pendidikan Vokasional terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di KEK Mandalika; *keenam*, persoalan adat istiadat mencakup keberlangsungan identitas sosial masyarakat Sasak yang terancam punah sebagai eksekusi pembangunan KEK Mandalika seperti ritual adat Mare Mradik atau Madak, Ngapung, Bau Nyale, dan Nazzar; perubahan-perubahan negatif dalam hal nilai budaya dan agama; munculnya kawasan lokalisasi di sekitar KEK Mandalika; dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dengan demikian, melalui implementasi konsep investasi berkelanjutan, sekerumit eksekusi investasi pembangunan KEK Mandalika mampu meminimalisir dampak lingkungan yang timbul serta mendorong optimalisasi dampak sosial

dan ekonomi bagi warga masyarakat sekitar yang terdampak investasi pembangunan KEK Mandalika (ITDC, 2018).

Ketiga, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh LSM SWIM, dalam hal ini diwakili oleh Direktur LSM SWIM, yakni Lalu Alamin bertajuk “Rasionalisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”. Melalui pemaparan materi, Lalu Alamin menggarisbawahi urgensi dan relevansi investasi berkelanjutan dalam mendukung pembangunan KEK Mandalika guna merealisasikan pencapaian SDGs. Ia menjelaskan dampak positif dan negatif dari adanya investasi pembangunan KEK Mandalika serta upaya mengurangi eksek yang ditimbulkan dari pembangunan KEK Mandalika. Lebih jauh, melalui elaborasi materi yang disampaikan, ia memaparkan upaya artikulatif dan advokasi terkait aspirasi warga masyarakat sekitar yang terdampak eksek pembangunan KEK Mandalika kepada *stakeholders* terkait terutama pihak pemerintah, dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta pihak ITDC terkait dengan pelbagai permasalahan yang timbul akibat pengembangan KEK Mandalika.

Lebih jauh, Lalu Alamin menggarisbawahi pelbagai isu krusial terkait eksek pembangunan KEK Mandalika seperti minimnya kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang ditandai dengan rendahnya tingkat pelibatan warga masyarakat sekitar yang terdampak dalam beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak ITDC yang berimbas pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat lokal; tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan yang rendah; pengusuran dan relokasi yang masih menyisakan persoalan terkait dampak sosial yang ditimbulkan terutama *cultural shock*; persoalan pemukiman tanpa disertai standar hidup yang layak; dan permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti banjir, sanitasi, dan persoalan sampah. Sekerumit permasalahan tersebut merupakan dampak konsekuensial dari adanya penetrasi investasi baik domestik maupun asing di KEK Mandalika yang hanya mengejar keuntungan belaka (*financial return*) tanpa mendatangkan dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan di KEK Mandalika. Secara esensial, investasi pembangunan KEK Mandalika merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, kegiatan pembangunan, serta dalam menikmati hasil pembangunan, khususnya pada tingkat lokal. Investasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus mengikuti tiga prinsip, yaitu keadilan, keberlanjutan, dan komunitas. (Ashari et al., 2016)

FOCUS GROUP DISCUSSION LITERASI INVESTASI BERKELANJUTAN

Kegiatan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun merupakan sesi kedua dari kegiatan *workshop* PKM PS HI Universitas Mataram. Sesi kedua *workshop* diikuti oleh kelompok warga masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung dari eksek pembangunan KEK Mandalika yang tergabung dan terafiliasi dengan LSM SWIM (Solidaritas Warga Inter Mandalika). Diskusi kelompok terpumpun berlangsung cukup kritis dan menghasilkan sebuah solusi atau jalan keluar dari beberapa permasalahan yang ada di Desa Kuta, Mandalika sebagai bagian dari salah satu desa penyangga (*buffering zone*) KEK Mandalika.

Selama berlangsungnya diskusi, persoalan utama yang disoroti adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat sekitar di KEK Mandalika menyangkut *roadmap* atau peta jalan pengelolaan KEK Mandalika. ITDC dipandang sebagai entitas eksklusif dan terkesan menutup diri karena dianggap hanya memprioritaskan dan memperjuangkan kepentingan korporasi dalam hal keuntungan investasi tanpa mempedulikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang timbul akibat penetrasi investasi tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pelibatan pengembangan dan pengelolaan KEK Mandalika. Hampir seluruh Desa yang berada di Lombok Tengah sudah bertransformasi menjadi Desa Wisata. Ini mengandung arti bahwa dalam setiap perhelatan akbar di KEK Mandalika para wisatawan domestik maupun turis mancanegara dapat berwisata di desa-desa wisata sekitar KEK Mandalika terutama desa-desa penyangga serta desa-desa wisata di luar KEK Mandalika. Namun realitas pengelolaan KEK Mandalika lebih banyak melibatkan pihak eksternal dalam hal manajemen karena masyarakat tidak dikutsertakan oleh pihak ITDC.

Isu lain yang menjadi fokus perhatian adalah persoalan *multiplier effects* dari keberadaan investasi pembangunan di KEK Mandalika. Peserta diskusi berargumen bahwa keberadaan investasi

pembangunan di KEK Mandalika semestinya memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Investasi pembangunan KEK Mandalika tidak berkontribusi secara signifikan bagi pengembangan ekonomi lokal (PEL) di sekitar KEK Mandalika sehingga tidak menghasilkan peningkatan pendapatan bagi warga masyarakat lokal. Selain itu, mereka menyoroti persoalan minimnya kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menyangkut pemberdayaan masyarakat di Desa Kuta, Mandalika serta desa-desa penyangga lain di sekitar KEK Mandalika.

Persoalan kritis lain yang menjadi sorotan utama adalah persoalan pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana dipahami salah satu aspek fundamental dalam investasi adalah faktor lingkungan. Investasi harus menyeimbangkan antara kepentingan bisnis korporasi dengan konservasi lingkungan di sekitar KEK Mandalika. Keberadaan investasi yang didorong oleh ITDC menciptakan degradasi lingkungan yang ditandai dengan sejumlah persoalan seperti banjir, sanitasi, irigasi, dan persoalan sampah. Maka dari itu investasi yang mengarusutamakan prinsip-prinsip ESG akan mampu mendorong keberlanjutan investasi di sektor bisnis industri pariwisata yang berdampak jangka panjang pada peningkatan pendapatan daerah terutama Kabupaten Lombok Tengah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal dari geliat pengembangan ekonomi lokal di sekitar KEK Mandalika.

Para peserta diskusi kelompok terpumpun juga menyoroti minimnya lokalitas dalam pembangunan KEK Mandalika. Mereka menyoroti tidak adanya identitas budaya lokal yang merefleksikan masyarakat Sasak Lombok dalam pembangunan infrastruktur di sekitar KEK Mandalika. Pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika semestinya mengakomodir lokalitas sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berwisata ke KEK Mandalika. Lokalitas yang dimaksud misalnya penggunaan gambar, simbol, atau ornamen seperti rumah adat Sasak, berugak, persean, dan lain-lain sebagai salah aspek yang ditonjolkan dalam infrastruktur di KEK Mandalika. Namun lokalitas itu tidak tampak sama sekali dalam pengembangan infrastruktur di KEK Mandalika. Mereka membandingkan pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL) — Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) yang secara dominan mengarusutamakan nilai-nilai lokal dalam pengembangan infrastruktur Bandara. Menurut mereka hal itu patut dicontoh sebagai model dalam pengembangan infrastruktur di KEK Mandalika karena memadukan nilai-nilai estetika lokal dan modern yang merefleksikan lokalitas Mandalika yang mengglobal.

Berdasarkan pemaparan sekerumit persoalan yang menjadi titik tekan dari perhatian para peserta diskusi kelompok terpumpun, maka dari itu, diperlukan langkah-langkah afirmatif dan advokatif secara konkret melalui upaya komunikasi dan membangun sinergitas dalam bentuk kolaborasi serta penyusunan kerangka kerja bersama menyangkut pengelolaan KEK Mandalika secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi berkelanjutan dengan segenap *stakeholders* terutama pihak ITDC. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap arus investasi yang masuk ke KEK Mandalika sehingga mampu memenuhi standar investasi berkelanjutan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terakhir peran serta aktif LSM SWIM patut diapresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi konkrit sebagai artikulator sekaligus jembatan penghubung kepentingan antara warga masyarakat sekitar di desa-desa penyangga KEK Mandalika dengan pihak ITDC selaku otoritas pemerintah pusat di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan KEK Mandalika menuai beragam persoalan mulai dari problematika ekonomi, lingkungan, budaya, dan tata kelola perusahaan. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari rendahnya tingkat literasi investasi berkelanjutan warga masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung dari eksekusi pembangunan KEK Mandalika sehingga mengurangi peran partisipasi aktif warga masyarakat sekitar dalam proses perencanaan, kegiatan pembangunan, serta dalam menikmati hasil pembangunan dari kehadiran investasi di KEK Mandalika. Keberadaan investasi di KEK Mandalika terbukti tidak memberikan *multiplier effects* bagi masyarakat sekitar di KEK Mandalika. Investasi yang berkembang tidak menyentuh aspek pengembangan ekonomi lokal (PEL) sehingga tidak berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Terlebih lagi kehadiran investasi lebih banyak memberikan kerugian dari sisi lingkungan karena terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lebih jauh, secara sosial, investasi KEK Mandalika tidak berdampak bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga warga masyarakat sekitar hanya sebagai objek pembangunan tanpa terlibat secara konstruktif mengambil manfaat dari ekspansi investasi di KEK Mandalika. Secara sosio-kultural, ekspansi investasi di KEK Mandalika mengancam pelestarian budaya serta identitas lokal yang terancam punah sebagai ekse modernisasi pembangunan di sekitar KEK Mandalika. Oleh karena itu diperlukan tata kelola KEK Mandalika yang koordinatif serta kolaboratif melibatkan segenap *stakeholders* terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), warga masyarakat sekitar di KEK Mandalika, serta pihak ITDC selaku otoritas KEK Mandalika guna membangun sinergitas tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan peran partisipasi aktif warga masyarakat sekitar dalam setiap tahapan pembangunan KEK Mandalika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lalu Alamin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) atas dukungan serta bantuan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. (2022, January 14). *Mengenal KEK Mandalika Lebih Dekat*. <https://kfmmap.asia/blog/mengenal-kek-mandalika-lebih-dekat/1737>
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2016). *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara: Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009–2013*. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.354>
- Cheesman, A. (2012). Special Economic Zones & Development: Geography and Linkages in the Indian EOU Scheme. *DPU Working Paper*, 145, 1–42. www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu
- DDTC. (2021). Tax, Customs, and Excise Treatment in Special Economic Zones. *DDTC Newsletter*, 5(7), 1–16. <https://ddtc.co.id/download/14998/>
- Estriani, H. N. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang dan Tantangan. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i1.995>
- Gumelar, G. (2018, August 29). *Bank Infrastruktur Asia akan Kucurkan Rp3,8 T untuk Mandalika*. ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829195736-92-326008/bank-infrastruktur-asia-akan-kucurkan-rp38-t-untuk-mandalika>
- Hachigian, H., & McGill, S. M. (2012). Reframing the governance challenge for sustainable investment. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 2(3–4), 166–178. <https://doi.org/10.1080/20430795.2012.742632>
- ITDC. (2018). *Analisis Dampak Lingkungan & Sosial dan Program Pengelolaan Lingkungan & Sosial dari Proyek Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika*. ESC. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/indonesia-mandalika/Environmental-and-Social-Impact_Bahasa.pdf
- ITDC Raih Pinjaman AS\$248,4 Juta dari AIIB. (n.d.). Retrieved October 3, 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181011/45/848279/itdc-raih-pinjaman-as2484-juta-dari-aiib>
- Jokowi-JK Diminta Ikutkan Indonesia dalam AIIB. (n.d.). Retrieved October 4, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2014/11/05/223514526/jokowi-jk.diminta.ikutkan.indonesia.dalam.aiib>
- Lina. (2018, August 2). *KEK Mandalika, Dorong Ekonomi NTB*. <https://pelakubisnis.com/2018/08/kek-mandalika-dorong-ekonomi-ntb/>
- PBB Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Mandalika, NGO Menuntut Dihentikannya Pembiayaan Proyek Pariwisata Indonesia yang Didanai AIIB | WALHI. (n.d.). Retrieved August 1, 2023, from <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam-pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aiib>

- Pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dapat Kucuran....* (n.d.). Retrieved October 3, 2022, from <https://www.industry.co.id/read/47692/pembangunan-infrastruktur-kek-mandalika-dapat-kucuran-pinjaman-aiib>
- Pérez, L., Hunt, V., Samandari, H., Nuttall, R., & Biniek, K. (2022). Does ESG really matter—And why? *McKinsey Quarterly*, 1–9. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/does%20esg%20really%20matter%20and%20why/does-esg-really-matter-and-why-vf.pdf>
- Pinjaman AIIB Cair, ITDC Alokasikan Rp 900 Miliar untuk KEK Mandalika | SuaraNTB.* (n.d.). Retrieved October 3, 2022, from <https://www.suarantb.com/2019/02/21/pinjaman-aiib-cair-itdc-alokasikan-rp-900-miliar-untuk-kek-mandalika/>
- Proyek Mandalika, KPPII: AIIB dan ITDC Melanggar Tiga Standar Lingkungan dan Sosial | Lingkungan.* (n.d.). Retrieved August 1, 2023, from <https://www.gatra.com/news-569476-lingkungan-proyek-mandalika-kppii-aiib-dan-itdc-melanggar-tiga-standar-lingkungan-dan-sosial.html>
- Rahman, F. (2022, January 11). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.* <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- Ramdani, Z. A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoearth*, 5(1). <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1639>
- Rasyid, K., & Darumurti, A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476>
- Senadheera, S. S., Gregory, R., Rinklebe, J., Farrukh, M., Rhee, J. H., & Ok, Y. S. (2022). The development of research on environmental, social, and governance (ESG): A bibliometric analysis. *Sustainable Environment*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/27658511.2022.2125869>
- Shanti, D., Afrimadona, & Kurniawan, A. (2018). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia Dan Cina. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 1(2), 63–72.
- Siaran Pers KPPII: Sengketa Lahan Mandalika Belum Selesai dan Pelanggaran HAM Terus Terjadi, AIIB Harus Ikut Bertanggung Jawab—WALHI Sulsel.* (n.d.). Retrieved August 1, 2023, from <https://walhisulsel.or.id/3946-siaran-pers-kppii-sengketa-lahan-mandalika-belum-selesai-dan-pelanggaran-ham-terus-terjadi-aiib-harus-ikut-bertanggung-jawab/>
- Susanti, M. A., Kurniati, N., Syaumudinsyah, & Lubna. (2022). Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Ilmu Adiministrasi Publik*, 10(1).
- Taufan. (2019, March 25). *Target SDG's, NTB Relatif Paling Tidak Siap dan Inkonsisten.* <https://www.lpwntb.or.id/target-sdgs-ntb-relatif-paling-tidak-siap-dan-inkonsisten/>
- Trans Sumatera: Pinjaman AIIB Untuk Pekan-Baru Dumai Dialihkan.* (n.d.). Retrieved October 4, 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161016/45/592992/trans-sumatera-pinjaman-aiib-untuk-pekan-baru-dumai-dialihkan>
- WALHI. (2022, May 13). *PBB Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Mandalika, NGO Menuntut Dihentikannya Pembiayaan Proyek Pariwisata Indonesia yang Didanai AIIB.* WALHI. <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam-pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aiib>
- Widyaningrum, M. (2023, July 13). *Studi Kasus Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-samarinda/baca-artikel/16280/Studi-Kasus-Pengembangan-Kawasan-Ekonomi-Khusus-KEK-Mandalika.html>
- Yoga, P. (2016, January 5). KEK Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi. *Infobanknews.* <https://infobanknews.com/kek-bisa-dorong-pertumbuhan-ekonomi/>